BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan hubungan yang melintasi batas wilayah suatu negara. Dimana dalam kehidupan internasional, setiap negara melakukan kerjasama, diplomasi dan lain-lain. Hubungan internasional berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia, hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain. Ilmu hubungan internasional merupakan ilmu dengan kajian interdisipliner, dari bidang ilmu-ilmu dalam kajiannya. Menurut Mas'oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* menjelaskan:

"Hubungan internasional didefenisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara , organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar dari studi ilmu hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilkau ini biasa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internsiona". (Mas'oed dalam Mochmad Yani, 2005 : 5).

Sebagai konsep, ilmu hubungan internasional sering diartikan sebagai aktifitas manusia dimana individu dan kelompok dari suatu negara berinteraksi secara resmi ataupun tidak resmi dengan individu atau kelompok dari negara lain. Hubungan internasional tidak hanya melibatkan kontak secara langsung, tetapi juga transaksi ekonomi, penggunaan kekuatan militer dan diplomasi, baik secara publik maupun pribadi. Studi hubungan internasional ditunjukan oleh aktifitas-aktifitas yang beragam seperti perang, bantua kemanusiaan, perdagangan dan inventasi internasional, parawisata bahkan olimpiade. (Lopez dan Stohl, 1989:3). Hubungan internasional tentunya adalah suatu hubungan yang melintasi batas suatu negara, segala bentuk interaksi yang melintasi batas negara termasuk dalam studi ilmu hubungan internasional. Khususnya yang mencakup hubungan luar negeri antar negara satu dengan negara lain, dalam hal ini hubungan luar negeri Indonesia-Belanda yang mengalami sedikit gangguan dengan hadirnya gerakan separatis RMS (Republik Maluku Selatan) yang bermarkas di Belanda dan dianggap oleh sebagian masyarakat Indonesia serta pemerintahannya mendapat suaka politik dari Belanda demi kepentingannya sendiri.

G.A Lopez dan Michael S. Stohl, berpendapat hubungan internasional bukan hanya mencakup hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi atau penggunaan kekuatan militer, serta langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah maupun non-pemerintah. (Lopez & Stohl 1989:3). Sedangkan menurut Holsti dalam bukunya "Politik Internasional : Suatu Kerangka Analisis" mengatakan bahwa :

> "Hubungan Internasional dapat mengacu pada semua bentuk interaksi antar anggota masyarakat yang berlainan, baik yang disponsori pemerintah maupun tidak. Hubungan internasional akan meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses politik antar bangsa, tetapi dengan memperhatikan seluruh segi hubungan itu" (Holsti, 1987:29).

Hubungan internasional tidak hanya mengkaji interaksi antar pemerintah negara-negara saja secara terpisah, tetapi juga membahas peran dari aktor-aktor lain seperti organisasi internasional, perusahan multinasional dan individu-individu dalam berbagai struktur politik, keamanan, ekonomi, sosial maupun budaya. Hubungan internasional turut memperhitungkan latar belakang sejarah serta kondisi geografis negara yang bersangkutan (Goldstein 1999:3).

Pada tahun 1920-an sampai 1930-an, studi hubungan internasional berjalan menuju tiga jalur yaitu :

1. Hubungan internasional dipelajari melalui penelaahan kejadian-kejadian yang sedang jadi berita utama dan dari bahan itu dicoba dibuat semacam pola umum kejadian.
2. Hubungan internasional dipelajari melalui studi tentang organisasi internasional
3. Hubungan internasional adalah model analisa yang menekankan ekonomi internasional (Mas'oed 1990:15).

Sedangkan mengenai cakupan hubungan dan jenis interaksi hubungan internasional Mas'oed dalam bukunya *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* menjelaskan:

> "Hubungan internasional didefenisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara , organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar dari studi ilmu hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilkau ini biasa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internsiona" (Mas'oed dalam Mochmad Yani, 2005 : 5).

2.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional menurut Jack C Plano dan Roy Olton dapat diartikan sebagai berikut :

> "Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi" (1999 : 11).

Sedangkan dalam buku *" Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri"*, Suffri Yusuf mengatakan bahwa :

> "Kepentingan nasional adalah konsep yang mengandung nilai-nilai yang merupakan dasar bagi usaha suatu negara untuk mencapai apa yang diidam-idamkan, dan untuk itu perlu disusun strategi yang merumuskan pangkalan dan sasaran. Sasaran ini dapat dibagi dalam sasaran jangka panjang, sasaran jangka menengah dan sasaran jangka pendek" (1989 : 30).

Kepentingan nasional terbagi ke dalam beberapa jenis :

1. *Core/Basic/Vital Interest* ; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari *Core/Basic/Vital Interest ini*.

2. *Secondary Interest,* meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya

2.3 Definisi Politik Luar Negeri

Politik luar negeri seperti yang dijelaskan Sumpena Prawirasaputra dalam bukunya *Politik Luar Negeri*, yaitu:

> "Politik luar negeri adalah kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan –tujuan yang telah ditetapkan khususnya tujuan untuk suatu kurun waktu yang sedang dihadapi yang lazim disebut kepentingan nasional. Pada hakekatnya, ia merupakan suatu pola sikap atau respon terhadap lingkungan ekologinya. Respon tesebut mempunyai latar belakang dengan persepsi, pengalaman, kekayaan alam serta kebudayaan politik yang biasanya di manifestasikan sebagai falsafah bangsa dan di akomodasikan dalam konstitusi" (Prawirasaputra, 1958 : 2).

Sedangkan menurut Perwita dan Yani dalam buku *Pengantar Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Secara umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formulasi nilai, sikap, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional dalam percaturan dunia internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 47)

Politik luar negeri muncul apabila suatu pemerintahan merasa perlu untuk bereaksi atau tidak bereaksi terhadap suatu keadaan yang berada diluar sistem politiknya. Adaptasi tingkah laku terhadap lingkungan adalah penjelasan yang diberikan James N. Roseneau dalam buku-nya yang berjudul *The Scientific Study of Foreign Policy* untuk menalaah bagaimana politik luar negeri suatu negara timbul:

> "Berbagai faktor yang berupa situasi dan kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal akan mempengaruhi pemerintah suatu negara untuk menjaga agar politik luar negerinya tetap sesuai (*adptive*). Melalui politik luar negeri, suatu negara mengharapkan perubahan-perubahan situasi agar tidak membahayakan eksistensi negara tersebut, baik eksistensi yang menyangkut politik, ekonomi, sosial-budaya dan keamanan".(Roseneau, 1980 : 27-92)

2.3.1 Tujuan Politik Luar Negeri

Holsti memberikan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri suatu negara yaitu :

1. Nilai, yang menjadi tujuan para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan adanya tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain (Holsti, 1987 :190).

Sedangkan menurut Dahlan Nasution dalam bukunya *"Politik Internasional, konsep dan teori"* mengatakan bahwa :

> "Politik luar negeri bertujuan untuk mencapai sasaran yang dianggapnya kepentingan nasional. Suatu sasaran mungkin meminta perubahan dalam situasi atau menghendaki dipertahankannya hubungan-hubungan baik yang sedang berlangsung. Karena itu penting adanya perumusan suatu sasaran secara konkret dan jelas sesuai dengan kondisi yang ada dan pilihan tindakan yang diambil negara" (1991 : 7).

Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" Anak Agung Banyu Perwita mengatakan bahwa :

> "Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi dimasa depan suatu negara, dimana pemerintah melalui perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat abstrak dan konkret. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula

bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu" (2005 : 51).

2.4 Definisi Kebijakan Luar Negeri

Didalam politik luar negeri ada satu perangkat atau instrumen yang mendukung berjalannya politik luar negeri sesuai dengan kepentingan nasional dan tujuan politik luar negeri yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara yakni kebijkan luar negeri. Dimana menurut Rosenau:

> "Defenisi kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya. Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan kelangkaan hidup suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka kita akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan interbal dan kebutuhan eksternal termasuk didalmnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik, kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa".

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh sebuah pemerintahan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri yaitu :

1. Menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik.
2. Menetapkan faktor situasional di lingkup domestik dalam internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri.
3. Menganalisa kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki.

4. Mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan tindakan yang diperlukan.
6. Secara periodek meninjau dan melaksanakan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.

2.5 Konsep Politik Internasional

Perubahan politik dari masa pertengahan ke masa modern pada dasarnya menimbulkanpembentukan negara yang wilayahnya merdeka. Negara menguasai wilayah dan menjadikannya sebagai properti negara, dan negara menguasai penduduk dari wilayah tersebut dan mengubah mereka menjadi bawahan yang kemudian menjadi warga negaraya. Dalam melakukan hubungan antar negara, suatu negara harus memiliki perimbangan kekuasaan yang berjalan secara otomatis dan harus mengikuti suatu garis politik untuk memelihara perimbangan kekuasaan yang dapat menunjukan stabilitas hubungan antara negara, yang bisa dianggap sebagai teori umum.

Masuknya politik ke dalam bidang keilmuan serta pembauran berbagai tipe analisis ini hanya merupakan salah satu alasan mengapa pengembangan konsep dan teori politik internasional semakin sukar. Masalah yang sama pentingnya dengan ini terletak pada sifat pokok bahasannya sendiri. Pola perilaku yang kita sebut politik internasional merupakan produk dari sejumlah faktor yang berinteraksi secara kompleks.

Politik internasional menyangkut seluruh dunia, bukan sekedar hubungan antarnegara, melainkan juga menyangkut kondisi-kondisi yang muncul di dalam negara yang mempengaruhi hubungan di antara negara-negara, konsekuensinya penstudi politik internasional harus mampu menganalisis dampak seluruh aktivitas yang berkaitan. Adapun faktor-faktor sosial yang harus diperhitungkan untuk bisa memahami peranan kultur dan proses sosial dalam politik dunia.

2.5.1 Definisi Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok dalam hubungan internasional. Ruang lingkup politik internasional terbatas hanya pada interaksi antar negara-negara yang berdaulat saja. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik di masyarakat internasional dalam arti yang sempit, yaitu dengan berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara-negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya.

Menurut Perwita dan Yani dalam buku Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa:

> "Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah dan lingkungan, atau suatu proses interaksi, interelasi aktor dalam lingkungannya. Dalam politik internasional terdapat interaksi antar negara khususnya interkasi yang didasari pada kepentingan nasional masing-masing negara. Interaksi tersebut kemudian akan membentuk pola-pola hubungan yang dilihat dari kecenderungan sikap dan tujuan pihak-pihak uang melakukan hubungan timbal balik tersebut yang berbentuk kerjasama, persaingan dan konflik" (Perwita & Yani, 2005 : 40).

Sedangkan menurut Dahlan Nasution dalama bukunya *"Politik Internasional, Konsep dan Teori"* mengatakan bahwa :

> "Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang lahir sebagai hasil reaksi dan interaksi politik luar negeri dari berbagai negara. Politik internasional berjalan dalam suatu sistem bukan didalam suatu masyarakat atau komunitas" (1991 : 41).

Dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" karangan Anak Agung Banyu Perwita, Holsti mengatakan bahwa :

> "Politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalan suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, interrelasi, dan *interplay* antar aktor dalm lingkungannya, politik internasional berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan politik lainnya" (2005 : 40).

2.6 Organisasi Internasional

Pada awalnya negaralah yang memiliki yurisdiksi secara mutlak dan eksklusivatas teritorialnya. Sedangkan subjek hukum selain negara tidak memiliki hak-hak tersebut, misalnya organisasi internasional yang diciptakan oleh negara-negara. Organisasi internasional ini hanya memiliki hak-hak dan kewajiban konvensi internasional. Dalam masyarakat modern, organisasi merupakan suatu kebutuhan setiap anggota masyarakat baik untuk skala lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Organisasi internasional adalah sebuah fenomena baru dalam waktu yang dihormati di dunia politik. Pertama kali munculnya organisasi internasional pada abad ke-19 dan menjdai kian penting selama abad ke-20. Organisasi internasional mempunyai fungsi seperti suatu negara modern, yaitu mempunyai hak, kewajiban dan kekuasaan yang dimiliki beserta alat perlengkapannya, semua itu diatur oleh hukum

nasional yang dinamakan HTN sehingga dengan demikian organisasi internasional sama halnya dengan alat perlengkapan negara modern yang diatur oleh hukum konstitusional internasional.

Organisasi internasional telah menyentuh beberapa dari disiplin ilmu, khususnya hubungan internasional, hukum internasional dan ekonomi politik internasional. Selain itu diplomatik dan sejarah internasional juga menerangkan bahwa kelahiran dan pertumbuhan setiap individu dalam organisasi internasional di abad 19 dan 20. Jadi inti ari penelitian dan pengajaran yang relatif baru ini adalah unsur struktural hubungan internasional yang lebih utama dalam mendapatkan perhatian (Rittberger & Zangi, 2006 : 3).

2.6.1 Definisi Organisasi Internasional

Dalam bukunya yang berjudul "*Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*" dapat dijumpai pengertian organisasi internasional yang substansinya bekisar masalah pengertian organisasi internasional dalam arti luas dan organisasi internaional dalam arti sempit yang dituangkan dalam beberapa defenisi berikut ini :

> "Organisasi internasional mempunyai arti ganda, dalam arti luas dan sempit. Organisasi internasional dalam arti luas menunjukan pada setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (internasional) baik yang bersifat publik maupun privat sedangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya menunjuk pada setiap organisasi yang bersifat publik" (1986: 1).

Sedangkan menurut Sumaryo Suryokusumo dalam bukunya "*Hukum Organisasi Internasional"* mengatakan bahwa :

> "Organisasi internasional adalah suatu proses; organisasi internasional juga menyangkut aspek-aspek perwakilan dari tingkat proses tersebut yang telah dicapai pada waktu tertentu. Organisasi internasional juga diperlukan dalam rangka kerja sama menyesuaikan dan mencari

> kompromi untuk menentukan kesejahteraan serta memecahkan persoalan bersama serta mengurangi pertikaian yang timbul" (1990 : 10).

Organisasi internasional adalah suatu bentuk dari gabungan beberapa negara atau bentuk unit fungsi yang memiliki tujuan bersama dalam mencapai persetujuan yang juga merupakan isi dari perjanjian atau c*harter.*

Sedangkan menurut Clive Archer dalam bukunya *"Internasional Organization"* menyatakan bahwa :

> "Organisasi internasional adalah suatu struktural formal dan berkelanjutan yang diwujudkan dengan persetujuan antara sedikit dua negara yang berdaulat dengan tujuan mencapai kepentingan-kepentingan bersama dan membangun kerja sama yang luas dengan institusi-institusi lain, walaupun tidak termasuk kepada lembaga-lembaga yang berorientasi pada keuntungan" (1983 : 6).

2.6.2 Tujuan Organisasi Internasional

Organisasi internasional mempunyai tujuan yang dapat dilihat dalam ulasan Colombis dan Wolfe dalam buku *Administrasi dan Organisasi Internasional* karangan T. May Rudy adalah :

1. Regulasi hubungan antarnegara terutama melalui cara-cara penyelesaian sengketa secara damai.
2. Mencegah perang, meminimalkan dan mengendalikan konflik internasional *conflict management.*
3. Memajukan dan meningkatkan kegiatan kerja sama ekonomi dan sosial untuk pembangunan dan kesejahteraan penduduknya.
4. *Collective Security* atau *Collective Deffence* (aliansi) sekelompok negata untuk menghadapi ancaman eksternal bersama.

Sedangkan menurut Field dan T. May Rudy, tujuan organisasi internasional baik IGOs maupun INGOs dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu :

1. Untuk memelihara kepentingan anggota-anggotanya di arena internasional (global dan regional).
2. Untuk mengimbangi organisasi internasional lainnya.
3. Untuk mengubah, memodifikasi, menyelaraskan kepentingan nasional dari negara-negara anngotanya (2005 : 31).

2.7 Konflik

Dalam ilmu-ilmu sosial, dikenal dua pendekatan yang bertentangan untuk memandang masyarakat. Kedua pendekatan ini meliputi pendekatan struktural-fungsional (konsensus) dan pendekatan stuktural-konflik. Dalam pendekatan struktural konflik masyarakat terintegrasi dengan suatu paksaaan dari kelompok yang dominan sehingga masyarakat selalu dalam keadaan konflik.

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, separatisme dan revolusi. Konflik persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok dan pemerintah. Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan bernegara, ada sejumlah konflik yang dari sifatnya tidak beraspek politik dan mengandung aspek politik. Dikatakan mengandung aspek politik karena langsung melibatkan lembaga-lembaga politik dan pemerintah. Seperti konflik antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dalam usaha mendapatkan atau

mempertahankan sumber-sumber yang dikuasai pemerintah; atau kegiatan kelompok masyarakat yang didukung dengan sejumlah golongan untuk melakukan kudeta atas pemerintah yang berkuasa.

Jadi, konflik yang mengandung unsur politik secara sempit dapat dirumuskan sebagai kegiatan kolektip warga masyarakat seperti individu, kelompok ataupun organisasi yang diarahkan untuk menentang kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, kebijakan, struktur dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan diantara partisipan politik.

2.7.1 Definisi Konflik

Defenisi konflik menurut Donald H. Weiss dalam bukunya *"Menyelesaikan konflik secara bijaksana",* mengatakan bahwa :

> "Konflik biasanya meletus karena ketidaksepakatan tidak terbuka, tidak bersahabat, atau tidak kooperatif. Konflik melibatkan ketidaksepakatan tentang apa yang benar, baik, atau indah, tetapi berbeda dengan ketidaksepakatan yang sederhana dalam hal setidaknya satu orang percaya, benar, atau keliru, bahwa haknya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannhya telah disangkal. Apa yang mungkin dimulai sebagai sebuah ketidaksepakatan sederhana berubah menjadi "kata-kata perang" (1994 : 24).

Sedangkan menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya *"Memahami ilmu politik"* mengatakan bahwa :

> "Konflik terjadi manakala terdapat benturan kepentingan dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horisontal merupakan kondisi yang harus ada *(necessary condition)* bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan

itu bukan kondisi yang memadai *(sufficient condition)* untuk menimbulkan konflik" (2010 : 195).

Menurut Paul Conn : "Konflik merupakan gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (zero-sum conflict) dan konflik menang-menang (non-zero-sum conflict). Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistik sehinbgga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sedangkan konflik menang-menang adalah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan dalam situasi konflik biasanya bukan hal-hal yang prinsipiil, tetapi bukan pula hal yang penting" (2010 : 196).

2.7.2 Latar Belakang Konflik

Dalam buku *"Memahami ilmu politik",* Ramlan Surbakti mengatakan konflik pada dasarnya dilatarbelakangi oleh dua hal :

1. Konflik yang Mencakup Kemajemukan Horizontal.

   Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi. Kemajemukan horizontal dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultural berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Kemajemukan horizontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan

bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

2. Konflik yang Mencakup Kemajemukan Vertikal.

   Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagaian masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dan menyebabkan kepincangan sehingga menimbulkan konflik (2010 : 194).

2.7.3 Jenis-Jenis Konflik

Menurut T. May Rudy dalam buku "*Hubungan Internasional Konteporer dan Masalah-Masalah Global",* Konflik dapat digolongkan dalam beberapa jenis konflik :

1. Konflik Budaya

   Konflik budaya mempunyai sifat yang lebih sempit atau terbatas. Ditinjau dari segi jumlah dari pihak yang terlibat dalam konflik, serta hal yang menyebabkan konflik yang terjadi (motivasi konflik).

2. Konflik Peradaban

   Konflik peradaban bersifat lebih luas daripada konflik budaya. Lebih luasnya konflik peradaban ini bisa dilihat dari segi banyaknya pihak yang terlibat dalam konflik.

3. Konflik Etnis

   Konflik etnis merupakan konflik yang berkenaan dengan kelompok sosial yang mempunyai kedudukan tertentu dipandang dari keturunan, adat, bahasa, agama, dan sebagainya.

4. Konflik Rasialisme

   Konflik rasialisme adalah konflik yang timbul akibat rasa emosional atas keunggulan dan kesempurnaan ras sendiri yang berdasarkan pra-anggapan, bahwa ras lain jauh lebih rendah. Rasialisme ini tidak berdasarkan ilmu berlawanan dengan norma-norma etis, perikemanusiaan dan hak-hak asasi (2003 : 75-76).

2.7.4 Penyelesaian Konflik

Holsti, dalam buku T. May Rudy mengungkapkan cara menyelesaikan konflik ke dalam enam bagian :

1. Melakukan Penarikan Tuntutan

   Penyelesaiannya, salah satu atau keduabelah pihak menahan diri untuk tidak melakukan tindakan fisik atau melalukan perundingan memenuhi tuntutan, atau menghentikan tindakan yang pada dasarnya akan menyebabkan tindakan balasan yang bermusuhan. Intinya salah satu pihak mengakhiri klain/tuntutan dan pihak lain menerima.

2. Penaklukan

   Akhir penaklukan dengan kekerasan tetap mencakup berbagai persetujuan dan perundingan diantara negara yang bermusuhan.

3. Tunduk atau Membentuk Deterrance (penangkalan)

   Kriteria yang dipakai untuk membedakan kepatuhan atau penangkalan dari penaklukan ialah ada atau tidak adanya implementasi ancaman untuk memakai kekerasan. Meskipun tidak terjadi kekerasan, perlu diketahui bahwa sikap tunduk merupakan akibat dari penerapan ancaman militer sebagai bentuk penyelesaian konflik dengan cara yang tidak damai. Pihak yang melakukan penangkalan atau penundukan akan menunjukan pada pihak lain bahwa kemungkinan resiko untuk melanjutkan tindakan atau mempertahankan tuntutan akan lebih besar dibanding melakukan kembali tuntutannya dan menghentikan sama sekali tindakannya.

4. Kompromi

   Kompromi adalah penyelesaian konflik atau krisis internasional yang menuntut pengorbanan dari posisi yang telah diraih oleh pihak yang bersengketa. Masalah utama dalam mencapai kompromi adalah bagaimana meyakinkan pihak yang bersengketa untuk menyadari bahwa resiko untuk tetap mempertahankan atau melanjutkan konflik diantara mereka jauh lebih besar dibanding resiko untuk melakukan penurunan tuntutan atau menarik mundur posisi militer dan diplomatik.

5. Penyelesaian Melalui Pihak Ketiga

   Akibat yang agak rumit dari penyelesaian konflik atau krisis internasional berdasarkan kompromi ialah penyelesaian melalui pihak ketiga. Bentuk penyelesaian seperti ini mencakup penyerahan persetujuan dan itikad untuk menyelesaikan masalah berdasarkan berbagai kriteria keadilan.

6. Penyelesaian Secara Damai

   Penyelesaian melalui cara-cara damai (perundingan, konsiliasi, dan lain-lain) sehingga masing-masing pihak yang bersengketa secara perlahan dapat menerima keadaan posisi yang baru (2003 : 77-78).

2.8 Gerakan Separatisme

Pertama, faktor ideologis dapat muncul sejalan dengan hadirnya pemahaman baru tentang tatanan kehidupan. Kegagalan negara-negara sekular dalam menata kehidupan manusia mendorong orang untuk mencari ideologi alternatif. Dekadensi moral dan pembusukan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi buah dari tatanan masyarakat sekular telah mengecewakan berbagai pihak. Mereka pada akhirnya mencari ideologi alternatif yang lebih baik, lebih adil, dan lebih mensejahterakan. Runtuhnya nilai-nilai kemuliaan manusia menjadi nilai-nilai materialistik dan individualistik, imperialisme gaya baru yang dibungkus dengan label globalisasi, yang merupakan strategi dan kandungan ideologi kapitalis yang masih eksis saat ini, juga membuat orang kecewa dan mencari ideologi lain. Penemuan atas ideologi baru tersebut kemudian turut mendorong kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan gerakan separatisme.

Secara teoritis, separatisme subur di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan, pembangunan terbengkalai, kaya akan sumber daya alam, dan kuatnya perasaan perbedaan etnis dengan etnis yang berkuasa. Berbagai pandangan tentang penyebab munculnya separatisme telah lama kita ketahui, dan para pengambil kebijakanpun sudah merumuskannya, dalam langkah-langkah aturan dan peraturan. Saparatisme di berbagai

Negara muncul karena berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik, penggunaan kekerasan yang melanggar HAM, dan berbagai hal lainnya yang kurang lebih sama.

2.8.1 Defenisi Gerakan Separatisme

Defenisi Gerakan Separatisme menurut Julius Pour dalam bukunya *"Dari Mengusir Kempeitai Sampai Menumpas RMS"* memaparkan bahwa:

> Gerakan Separatis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius (Julius Pour 2008 : 3)

> Gerakan Separatisme merupakan paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri) Separatisme selalu dipahami sebagai gerakan yang bersifat politis untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain) (2008 : 4)

> Sedangkan menurut Ikrar Nusa Taluhela : Gerakan Separatisme muncul akibat berbagai faktor, seperti faktor ideologi, ketidak adilan, kesejahteraan, kebijakan politik dan penggunaan kekerasan yang melanggar HAM sehingga timbullah pergerakan untuk membebaskan dan memerdekakan diri. (Ikrar Taluhela 2000 : 22)

Sedangkan dalam buku *"Penumpasan Pemberontak Separatisme Di Indonesia"* George Larson mengatakan :

> Gerakan Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia (biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam) dari satu sama lain (atau suatu negara lain) (2001 : 21).

> Gerakan separatis merupakan suatu gerakan untuk memisahkan suatu wilayah dan untuk mendapatkan kedaulatan, gerakan ini biasanya

berbasis nasionalisme atau kekuatan religius. Selain itu, separatisme juga bisa terjadi karena perasaan kurangnya kekuatan politis dan ekonomi suatu kelompok (2003 : 22).

2.8.2 Konsep Gerakan Separatisme

Menurut Dewi Fortuna Anwar dalam bukunya *Konflik Kekerasaan Internal : Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik dan Kebijakan di Asia Pasifik* mengatakan bahwa :

> Konsep Separatisme berkaitan erat dengan pembentukan negara. Sejumlah gerakan separatis memiliki sejarah panjang rasa benci kepada pemerintah pusat dan kelompok suku atau agama yang dominan. Hal tersebut lah yang membuat konsep ini terlahir sebagai wujud dari penentangan terhadap pemerintah (1998 : 210).

Sedangkan menurut Rangga Sujud Widigda dlm artikelnya Separatisme, Bentuk Kekecewaan Terhadap Negara mengatakan :

> Konsep Gerakan separatisme terlahir akbiat adanya paham atau gerakan untuk memisahkan diri (mendirikan negara sendiri). Hal ini merupakan salah persepsi dan penyempitan makna. Hal itu dikarenakan bahwa separatisme dapat menunjukkan bentuknya tidak hanya dalam negara, namun juga agama, organisasi, bahkan suku. mulai dari aksi militan para pihak yang disebut "pemberontak", gerakan politik, hingga gerakan politik yang dilandasi prinsip agama.

Menurut George Larson , dalam buku *"Penumpasan Pemberontak Separatisme Di Indonesia"* mengatakan :

> Bahwa konsep separatisme muncul akibat adanya suatu paham yang mengambil keuntungan dari pemecah-belahan dalam suatu golongan (bangsa). Sehingga membentuk suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Gerakan separatis biasanya berbasis nasionalisme atau kekuatan religius (1991 : 20).